

Aspek Distribusi pada Ketahanan Pangan Masyarakat di Kabupaten Tapin

Emy Rahmawati

Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian
Universitas Lambung Mangkurat
Jalan A.Yani KM. 36 PO BOX 1028 Banjarbaru 70714

ABSTRACT

The objectives of the research were to find out the distribution channels of the staple food, namely the commodity of rice, and to analyze the cost, margin, and income from each marketing agent related to the rice distribution in Tapin Regency. The data were collected by conducting direct interviews with the players or the marketing agents getting involved in the food distribution. There were six distribution channels of rice, in which the role of LUEP was notably dominant. The biggest margin occurred between wholesalers and local retailers. Likewise, the biggest income was received by local retailers.

Keywords: distribution, marketing agent, LUEP, food security

Pendahuluan

Pembangunan ketahanan pangan merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian, tidak terlepas dari berbagai tantangan dan masalah baik yang bersifat makro atau berupa kasus-kasus. Liberalisme perdagangan termasuk produk pertanian serta berlakunya otonomi daerah, merupakan tantangan kebutuhan pangan.

Pembangunan Sektor Pertanian itu sendiri tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi, tetapi yang terpenting adalah meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan petani beserta keluarganya melalui kualitas gizi masyarakat.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Permasalahan strategis dalam pembangunan ketahanan pangan dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu:

1. Produksi, terutama ketersediaan dan kecukupan di tingkat nasional, daerah dan rumah tangga;
2. Distribusi, berupa pemerataan pangan antar wilayah, antar waktu dan antar golongan pendapatan masyarakat, termasuk keterjangkauan harga pangan strategis;

3. Konsumsi, meliputi peningkatan kualitas konsumsi gizi, penganeekaragaman pangan dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Keberhasilan pembangunan ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada keberhasilan meningkatkan produksi. Tetapi, perlu ditakar secara komprehensif berdasarkan tiga pilar utama, yakni produksi yang cukup, distribusi yang lancar dan merata, serta konsumsi pangan yang aman dan berkecukupan gizi bagi seluruh individu masyarakat.

FAO memberikan ketegasan bahwa ketahanan pangan tercapai jika semua individu sepanjang waktu dapat mengakses pangan, bukan hanya pada saat panen raya saja. Pangan harus tersedia sepanjang tahun. Maknanya, kelebihan produksi pada satu musim tanam harus dikelola agar bisa memenuhi kebutuhan pangan pada saat paceklik.

Pangan yang dihasilkan di sentra-sentra produksi harus diangkut ke pasar agar secara fisik semua konsumen mempunyai akses untuk mendapatkannya dan setelah sampai di pasar harganya harus tetap terjangkau oleh konsumen.

Ilustrasi tersebut dapat memper-tegas bahwa pembangunan ketahanan pangan sesungguhnya jauh lebih diutamakan jika dibandingkan dengan upaya untuk pencapaian status swasembada pangan. Setelah mampu memproduksi, maka tahap berikutnya adalah mendistribusikan bahan pangan tersebut agar tersedia bagi semua konsumen.

Dengan distribusi pangan yang baik, diharapkan pangan dapat tersedia dalam jumlah yang cukup bagi masyarakat baik dari segi jumlah, mutu, dan keragamannya sepanjang waktu. Kecukupan pangan juga meliputi ketersediaan pangan secara terus menerus, merata disetiap daerah, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Kegiatan distribusi pangan dapat dikatakan sebagai suatu proses yang mengalirkan pangan dari produsen yang disertai dengan perpindahan hak milik dan penciptaan guna, waktu, tempat dan bentuk yang dilakukan oleh lembaga distribusi atau pemasaran dengan melaksanakan satu atau lebih dari fungsi pemasaran.

Distribusi juga mengandung pengertian suatu proses yang membawa produk dari tempat dimana produk tersebut diproduksi ke suatu tempat yang terdekat dengan konsumen akhir. Dengan demikian sistem distribusi yang efisien menjadi prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan khususnya pangan pokok yaitu

komoditas padi/beras dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau.

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui saluran distribusi pangan pokok masyarakat yaitu komoditas padi/beras di Kabupaten Tapin.
2. Menganalisis besarnya biaya, margin, dan keuntungan dari setiap lembaga pemasaran yang terkait dengan distribusi pangan pokok (beras) dari produsen hingga ke konsumen akhir di Kabupaten Tapin.

Tinjauan Pustaka

Saluran Distribusi

Saluran distribusi dapat diartikan sebagai suatu jalur yang dilalui oleh arus distribusi suatu produk yang dihasilkan oleh produsen ke perantara dan akhirnya sampai ke konsumen akhir.

Saluran distribusi mempunyai tujuan untuk membawa suatu produk ke suatu tempat (pasar) sehingga konsumen dapat memperoleh produk tersebut. Jadi pasar merupakan tujuan akhir dari kegiatan saluran distribusi. Sehingga saluran distribusi dapat diartikan sebagai suatu jalur perantara yang membawa suatu produk dari produsen untuk melakukan pemasaran mulai dari tahapan transportasi/pengangkutan maupun penyimpanan suatu produk barang dan jasa

pemasaran hingga mencapai konsumen akhir.

Pada umumnya, saluran distribusi untuk komoditas pertanian sangat panjang yang akan menghubungkan dari produsen (petani) dimana produk pangan akan berpindah dari sisi produksi ke sisi konsumen akhir. Proses distribusi tersebut dapat dilakukan oleh: (i) pedagang pengumpul yang melakukan pengumpulan dari daerah produsen untuk dibawa ke pasar atau ke industri pengolahan pangan sebelum sampai ke konsumen akhir, (ii) penggilingan, yang memproses gabah untuk dilakukan penggilingan sebelum di jual ke pasar; (iii) pedagang besar/distributor/pedagang antar pulau dan antar wilayah untuk mendistribusikan atau memasarkan di dalam atau luar wilayah produsen maupun dijual ke industri pengolahan sebagai bahan baku industri pengolahan pangan, atau (iv) pedagang pengecer di wilayah produsen dan lain-lain.

Fungsi Distribusi

Dalam melakukan proses penyaluran, suatu produk/barang memerlukan lembaga-lembaga distribusi/pemasaran yang akan menyalurkan atau menyampaikan produk atau jasa ke konsumen. Lembaga distribusi/pemasaran khusus untuk komoditas pangan akan berusaha untuk memindahkan secara cepat juga melakukan pertimbangan-pertimbangan, seperti :

1. Letak geografis konsumen yang menyebar dan produsen

- pangan yang terbatas pada wilayah-wilayah tertentu.
2. Waktu produk komoditas pertanian diproduksi tidak selalu bersamaan dengan waktu produk tersebut dibutuhkan oleh konsumen.
 3. Sifat produk yang tidak dapat disimpan terlalu lama dan mudah rusak sedangkan variasi/selera konsumen sangat beragam.
 4. Produsen dan konsumen sukar untuk saling mengetahui dan berkomunikasi kapan suatu produk akan diproduksi, apa masalah yang dihadapi dalam mendistribusikannya.
 5. Produk pertanian tidak dapat diproduksi secara massal dan sangat tergantung pada musim, sedangkan kebutuhan konsumen sehari-hari sudah tertentu.

Oleh karena itu, setiap lembaga distribusi/pemasaran akan melakukan fungsi-fungsinya yang terdiri dari fungsi pertukaran, fungsi fisik dan fungsi fasilitas. **Fungsi pertukaran** terdiri dari fungsi pembelian dan fungsi penjualan. **Fungsi fisik** terdiri dari fungsi pengangkutan, pengolahan, dan penyimpanan. Sedangkan **fungsi fasilitas** terdiri dari fungsi standarisasi, sortasi, grading, pengepakan, pelabelan, penang-gungan resiko, pembiayaan, promosi, informasi pasar, dan sebagainya.

Kebijakan Distribusi

Kelancaran dalam distribusi pangan atau beras mutlak diperlukan dalam menjaga ketahanan

pangan karena beras memiliki ciri membutuhkan waktu dalam penyediaannya, baik distribusi antar daerah maupun antar waktu. Jeda waktu (*lag*) penyediaan beras terjadi karena produksi padi sangat tergantung musim tanam. Karena itu pada bulan-bulan tertentu, terutama saat panen raya pasokan beras melimpah. Sedangkan pada musim paceklik pasokan beras cenderung berkurang, bahkan sering terjadi kerawanan pangan pada daerah-daerah tertentu. Persediaan beras antardaerah tidak merata karena kemampuan produksi antarwilayah yang tidak sama. Sehingga pengaturan distribusi pangan yang baik sangat diperlukan.

Tujuan kebijakan distribusi adalah untuk menjamin ketersediaan pangan sepanjang tahun secara merata dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Karena itu sejak tahun 1967 pemerintah menunjuk Bulog untuk mengatur penyediaan beras dalam negeri dan menstabilkan harga. Perum Bulog memiliki setidaknya 3 tugas publik yang terkait dengan beras, yaitu: (i) jaminan harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras; (ii) pengelolaan raskin, dan (iii) cadangan atau stok pangan nasional.

Tugas pembelian gabah secara nasional bertujuan memberikan harga yang wajar pada petani terutama pada saat panen raya melalui HPP sebagai sumber pengadaan dalam negeri. Gabah dan beras hasil pengadaan dalam negeri akan menjadi persediaan yang tersimpan dalam gudang-

gudang (divre) di seluruh tanah air sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 1 sampai 1,5 juta ton (*buffer stock*). Cadangan ini dapat digunakan pemerintah sebagai sumber bantuan sosial, operasi pasar, keperluan darurat dan suplai pasar tertentu. Dibandingkan dengan jumlah konsumsi total, besarnya CBP tersebut belum merepresentasikan pengaruh Bulog terhadap distribusi beras dalam negeri. Sebagian besar distribusi beras di Indonesia (lebih dari 90%) melalui mekanisme pasar.

Untuk menjaga kuantitas dan kualitas CBP, pemerintah mengizinkan Bulog untuk mendistribusikannya kepada keluarga miskin melalui Raskin. Apabila dalam penyaluran beras terjadi kekurangan stok yang tidak dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka Perum Bulog dapat melakukan impor agar cadangan pangan nasional tercukupi. Seperti yang pernah dilakukan pada pertengahan tahun 2007, impor dilakukan karena pada saat itu stok beras di gudang Bulog hanya sekitar 600 ribu ton sehingga tidak cukup untuk menjaga stok aman selama minimal 3 bulan ke depan. Jumlah ini tergolong rawan karena masih dibawah *buffer stock* yang minimal 1 juta ton beras.

Proses distribusi beras di Indonesia sendiri dilakukan dengan dua cara yaitu melalui Bulog dan mekanisme pasar. Bulog hanya menguasai sekitar 10 persen dari pangsa pasar beras nasional, sedangkan sisanya melalui mekanisme pasar. Untuk mencegah

terjadinya kerawanan pangan, Bulog mendistribusikan berasnya pada gudang-gudang (divre dan subdivre) di seluruh provinsi di Indonesia.

Metode Penelitian

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Tapin. Penelitian ini berlangsung selama 5 bulan terhitung mulai bulan Juni sampai dengan Nopember 2011.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pelaku-pelaku atau lembaga pemasaran yang terlibat dalam distribusi pangan pokok (beras) dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disediakan. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai Dinas atau instansi yang ada kaitannya dengan penelitian ini, seperti Dinas Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, dan BPS Kabupaten Tapin.

Analisis Data

Tujuan pertama, adalah dengan mendeskripsikan saluran distribusi pangan pokok masyarakat yaitu komoditas padi/beras di Kabupaten Tapin. Dilakukan dengan cara menelusuri tiap-tiap lembaga pemasaran yang terlibat di dalamnya.

Tujuan kedua yaitu menganalisis besarnya biaya, margin, dan keuntungan dari setiap lembaga pemasaran yang terkait dengan distribusi pangan pokok (beras) di Kabupaten Tapin.

Margin pemasaran diperoleh dengan menghitung selisih antara harga yang dibayar konsumen akhir/pembeli terakhir (H_c) dengan harga yang dibayar kepada petani sebagai produsen atau penjual pertama (H_p) digunakan rumus:

$$M_i = H_c - H_p \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- M = Margin Pemasaran (Rp/kg)
- H_c = Harga yang dibayar oleh pembeli terakhir (Rp/kg)
- H_p = Harga yang dibayar kepada penjual pertama (Rp/kg)
- i = Petani, pedagang pengumpul, pembeli akhir

Untuk menghitung biaya pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran digunakan rumus:

$$C_{ij} = A_{ij} \times P_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

- C_{ij} = Biaya pada tingkat ke- i pada kegiatan ke- j (Rp/kg)
- A_{ij} = Kegiatan di tingkat ke- i pada kegiatan ke- j
- P_{ij} = Harga atau biaya yang dikeluarkan di tingkat kegiatan ke- j (Rp/kg)
- i = Tingkat petani, pedagang pengumpul, pembeli akhir
- j = Kegiatan pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, tenaga kerja serta kegiatan lainnya.

Untuk menghitung keuntungan pemasaran, yaitu selisih antara margin pemasaran (M) dengan biaya pemasaran (C), digunakan rumus:

$$\pi_i = M_i - C_i \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan:

- M_i = Margin pemasaran di tingkat ke- i (Rp/kg)
- C_i = Biaya pemasaran di tingkat ke- i (Rp/kg)
- π_i = Keuntungan di tingkat ke- i (Rp/kg)
- i = Tingkat petani, Pedagang pengumpul, pembeli akhir

Hasil dan Pembahasan

Saluran Distribusi

Saluran distribusi mempunyai tujuan untuk membawa suatu produk ke suatu tempat (pasar) sehingga konsumen dapat memperoleh produk tersebut. Saluran distribusi dapat diartikan sebagai suatu jalur perantara yang membawa suatu produk dari produsen untuk melakukan pemasaran mulai dari tahapan transportasi/pengangkutan maupun penyimpanan suatu produk barang dan jasa pemasaran hingga mencapai konsumen akhir.

Dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin, tiga kecamatan merupakan daerah penghasil padi tertinggi diantara kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Candi Laras Utara, Tapin Tengah, dan Candi Laras Selatan. Kondisi ini berkorelasi positif dengan kondisi surplus yang terjadi, dimana ke tiga

kecamatan tersebut juga mengalami surplus beras tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya.

Saluran distribusi padi/beras yang terjadi di Kabupaten Tapin tidak hanya dalam lingkup satu kecamatan, atau dalam kabupaten sendiri dari kecamatan surplus kepada kecamatan lain yang minus, tetapi juga terdapat saluran distribusi yang keluar dari Kabupaten Tapin ke kabupaten lain di Kalimantan Selatan, bahkan ke daerah lain di luar Kalimantan Selatan, yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Kondisi ini terjadi karena secara keseluruhan Kabupaten Tapin mengalami surplus beras yang cukup tinggi, sehingga sangat memungkinkan terjadinya arus distribusi beras keluar daerah, walaupun terdapat beberapa kecamatan yang produksi padinya tidak begitu tinggi bahkan mengalami minus. Kecamatan yang mengalami minus dilihat dari ketersediaan berasnya adalah Kecamatan Salam Babaris. Kondisi ini berkaitan dengan produksi padinya yang sangat rendah, karena Salam Babaris merupakan daerah penghasil batu bara di Kabupaten Tapin.

Beberapa pelaku atau lembaga pemasaran yang terlibat dalam melakukan kegiatan distribusi padi/beras di kabupaten Tapin adalah pedagang pengumpul, LUEP (Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan), pedagang grosir, dan pedagang pengecer.

Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) yaitu kegiatan memberikan

dana talangan tanpa bunga kepada LUEP untuk membeli gabah secara langsung dari petani, terutama pada saat panen raya dengan harga yang sesuai harga pembelian pemerintah (HPP). Jadi LUEP merupakan salah satu lembaga yang terlibat dalam distribusi beras masyarakat.

Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) merupakan kebijakan pemerintah agar petani lebih dekat dengan pasar yaitu dapat melakukan penjualan produk usahanya melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan yang menerima dana bantuan pemerintah (Dana Penguatan Modal). Hal ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas harga padi/gabah. Stabilisasi harga gabah hasil panen petani pada saat panen raya merupakan aspek yang sangat penting dan menentukan pendapatan dan ketahanan pangan petani padi. Dengan meningkatnya pembelian gabah oleh LUEP dengan harga yang tinggi diharapkan dapat mempengaruhi harga gabah di wilayah dan menggerakkan agribisnis perberasan secara keseluruhan.

Saluran distribusi padi/beras yang terjadi di Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

1. Petani → Pengecer Lokal → Konsumen
2. Petani → Pedagang Pengumpul → Pengecer lokal → Konsumen
3. Petani → Pedagang Pengumpul → Pedagang

- Grosir → Pengecer Lokal → Konsumen.
4. Petani → LUEP → Pedagang Grosir → Pengecer Lokal → Konsumen
 5. Petani → LUEP → Pedagang Grosir luar kabupaten → Pengecer → Konsumen.
 6. Petani → LUEP → Pedagang Grosir luar provinsi → Pengecer → Konsumen.

Terdapat enam saluran distribusi beras yang terjadi di Kabupaten Tapin, mulai dari saluran distribusi yang pendek, dimana antara petani sebagai produsen dan konsumen hanya melalui perantara sebuah lembaga pemasaran yakni pengecer lokal. Kondisi ini umumnya terjadi pada daerah dimana konsumen berada dengan jarak tidak begitu jauh dari lokasi petani.

Saluran distribusi yang lebih panjang adalah dengan terlibatnya pedagang pengumpul. Sebelum beras sampai ke tangan konsumen, beras mengalami pendistribusian terlebih dahulu melalui pedagang pengumpul, kemudian ke pedagang grosir, pengecer lokal hingga akhirnya ke konsumen. Pada kondisi ini umumnya pedagang pengumpul yang memiliki modal cukup besar akan mendatangi petani pada saat panen, membelinya dengan tingkat harga yang disepakati, yang kemudian menjualnya kembali kepada lembaga pemasaran lainnya seperti pedagang grosir atau pengecer.

Pada tiga saluran distribusi beras terakhir, terdapat LUEP sebagai salah satu lembaga pemasaran

yang terlibat dalam distribusi beras di Kabupaten Tapin. Dengan adanya bantuan pendanaan dari pemerintah untuk pembelian gabah petani, peran LUEP tampak sangat dominan dalam pendistribusian gabah/ beras petani. Melalui LUEP inilah pendistribusian beras dalam jumlah besar sering terjadi baik kepada pedagang grosir di luar kabupaten Tapin terutama Kota Banjarmasin, bahkan keluar Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011, Kabupaten Tapin memiliki tingkat produksi padi tertinggi kedua di Kalimantan Selatan setelah Barito Kuala, demikian juga dengan kondisi surplus beras. Hal ini berarti bahwa dari aspek ketersediaan, Kabupaten Tapin memiliki tingkat ketahanan pangan yang tinggi. Namun dengan pendistribusian beras dari Kabupaten Tapin keluar daerah yang kurang terkontrol, dikhawatirkan hal ini dapat mengganggu terhadap ketahanan pangan pokok masyarakat di Kabupaten Tapin. Berdasarkan kenyataan inilah, hendaknya terdapat manajemen stok pangan yang baik di Kabupaten Tapin, sehingga ketahanan pangan masyarakatnya dapat selalu terjaga sepanjang waktu.

Biaya, Marjin dan Keuntungan Pemasaran

Biaya pemasaran komoditas padi/ beras mencakup biaya pengolahan/penggilingan, pengangkutan, tenaga kerja, bongkar muat dan

biaya pengepakan. Keuntungan pemasaran adalah bagian dari margin pemasaran. Margin pemasaran merupakan perbedaan harga yang dibayar kepada petani/penjual pertama dan harga yang dibayar oleh konsumen akhir. Dengan demikian, dalam margin pemasaran didalamnya termasuk biaya dan keuntungan pemasaran, sehingga margin pemasaran dipengaruhi oleh kedua komponen tersebut.

Dari hasil penelitian, bahwa biaya, margin dan keuntungan pemasaran beras yang terjadi pada setiap lembaga pemasaran yang masih berada dalam lingkup Kabupaten Tapin disajikan pada Lampiran 1.

Dari saluran distribusi beras di Kabupaten Tapin, margin terbesar terjadi antara lembaga pemasaran pedagang grosir dan pengecer lokal. Demikian pula dengan keuntungan yang diperoleh, terbesar diterima oleh pengecer lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pedagang pengecer sebagai mata rantai pemasaran paling akhir justru menerima keuntungan tertinggi dibanding lembaga pemasaran lainnya yang terlibat dalam distribusi beras di Kabupaten Tapin.

Kesimpulan

1. Terdapat enam saluran distribusi beras yang terjadi di Kabupaten Tapin. Pada tiga saluran distribusi beras terakhir, terdapat LUEP sebagai salah satu lembaga pemasaran yang terlibat dalam

distribusi beras. Dengan adanya bantuan pendanaan dari pemerintah untuk pembelian gabah petani, peran LUEP tampak sangat dominan dalam pendistribusian gabah/ beras petani.

2. Dari saluran distribusi beras di Kabupaten Tapin, margin terbesar terjadi antara lembaga pemasaran pedagang grosir dan pengecer lokal. Demikian pula dengan keuntungan yang diperoleh, terbesar diterima oleh pengecer lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pedagang pengecer sebagai mata rantai pemasaran paling akhir justru menerima keuntungan tertinggi dibanding lembaga pemasaran lainnya yang terlibat dalam distribusi beras di Kabupaten Tapin.

Saran

1. Bahwa dari aspek ketersediaan, Kabupaten Tapin memiliki tingkat ketahanan pangan yang tinggi. Namun dengan pendistribusian beras dari Kabupaten Tapin keluar daerah yang kurang terkontrol, dikhawatirkan hal ini dapat mengganggu terhadap ketahanan pangan pokok masyarakat di Kabupaten Tapin. Berdasarkan kenyataan inilah, hendaknya terdapat manajemen stok pangan yang baik di Kabupaten Tapin, sehingga ketahanan pangan masyarakatnya dapat selalu terjaga sepanjang waktu.

Daftar Pustaka

- Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan. 2010. Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Banjarbaru.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin. 2011. Tapin Dalam Angka Tahun 2010. BPS Kabupaten Tapin. Rantau.
- Departemen Pertanian. 2005. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Padi. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Firdaus, Muhammad. 2008. Swasembada Beras dari Masa ke Masa. Telaah Efektivitas Kebijakan dan Perumusan Strategi Nasional. IPB Press. Bogor.
- Kasryno, Faisal., Effendi Pasandaran dan Achmad M. Fagi. 2003. Ekonomi Padi dan Beras Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Masyhuri. 2006. Agribisnis Perberasan di Indonesia. Dalam Kebijakan dan Pengembangan Kelembagaan Pangan dalam Menunjang Ketahanan Pangan Nasional. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UGM. Yogyakarta.
- Suryana, Akhmad. 2003. Kebijakan Ketahanan Pangan. Dalam kapita Selektta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan. BPFE. Yogyakarta.

Lampiran

Lampiran 1. Harga jual beras, biaya, margin, dan keuntungan pemasaran dari setiap lembaga pemasaran beras di Kabupaten Tapin, tahun 2011

No	Lembaga Pemasaran	Harga jual (Rp/kg)	Biaya (Rp/kg)	Margin (Rp/kg)	Keuntungan (Rp/kg)
1	Petani	5.783			
2	LUEP/Pedagang pengumpul	5.948	78	165	87
3	Pedagang Grosir	6.063	63	115	52
4	Pengecer Lokal	7.480	266	1.417	1.151
5	Konsumen				
	Total		407	1.697	1.290